

Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Muhammad Ismail Al-Faruqi*, Pupung Purnamasari, Mey Maemunah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* ismailalfaruq88@gmail.com, p_purnamasari@yahoo.co.id, mey_maemunah@yahoo.com

Abstract. Corruption cases are still rampant, especially in the environment of local governments. Therefore, this study aims to obtain empirical evidence on the effect of audit opinions and audit findings on the level of corruption in local governments. The population in this study is the government of district/cities in West Java for the period 2020-2022, the sample of this study uses census sampling technique, so that 81 sample are obtained. The analytical tool used in this study is IBM SPSS Statistics 23. The results of this study show that audit opinion has a significant effect on the level of corruption in local governments. Audit findings do not have a significant effect on the level of corruption in local governments.

Keywords: *Audit Opinion, Audit Findings, Level of Corruption in Local Governments.*

Abstrak. Kasus tindak pidana korupsi hingga saat ini masih marak terjadi, khususnya pada lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2020-2022, sampel penelitian ini menggunakan teknik sensus sampling, sehingga diperoleh 81 sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah IBM SPSS Statistics 23. Hasil penelitian ini menunjukkan opini audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Opini Audit, Temuan Audit, Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah.*

A. Pendahuluan

Selama bertahun-tahun, tindak pidana korupsi merupakan salah satu kasus yang menjadi permasalahan banyak negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Organisasi internasional, yakni Transparency International mengemukakan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2022 mendapatkan nilai 34/100 dan berada di posisi 110 dari 180 negara. Perolehan skor CPI ini mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 2021 dengan skor 38/100 dan berada di rangking 98 dari 180 negara. Dengan menurunnya perolehan skor CPI tersebut, menandakan bahwa fenomena korupsi di Indonesia saat ini bukannya mengalami penurunan, justru malah semakin banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.

Korupsi merupakan tindakan yang destruktif dan masih sering terjadi di Indonesia, khususnya pada tingkat daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi pada tingkat daerah, salah satu faktor yang umumnya terjadi adalah penyalahgunaan wewenang yang berujung pada transaksi suap-menyuap merupakan bentuk korupsi kepala daerah yang paling sering terungkap.

Pemerintah daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di Indonesia, pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dibantu oleh perangkat daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ukurannya disesuaikan dan disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, memastikan bahwa fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik, jika sumber daya yang cukup diberikan kepada daerah.

Bidang pengelolaan keuangan diatur dalam Undang-Undang yang mengatur keuangan negara. Untuk mengelola keuangan daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang terpisah, gubernur, bupati, atau walikota adalah kepala pemerintah daerah dan mereka bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada mereka.

Korupsi, otonomi daerah, dan desentralisasi terus diperdebatkan di Indonesia. Korupsi bukanlah fenomena baru setelah reformasi. Cameron *et al.* (2009) menemukan bahwa sebelum reformasi, Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme juga dikenal sebagai KKN terkonsentrasi di kalangan keluarga presiden, para pemimpin militer, dan konglomerat Cina. Namun, dengan munculnya desentralisasi dan otonomi daerah, kasus korupsi menjadi lebih mudah ditemukan. Silih berganti kepala daerah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Modus korupsi tidak banyak yang berubah. Penyalahgunaan wewenang yang berujung pada transaksi suap-menyuap dan perjualbelian kewenangan merupakan bentuk korupsi kepala daerah yang paling banyak terungkap.

Valsecchi (2012) menyatakan bahwa desentralisasi menyebabkan pejabat daerah melakukan korupsi di pemerintah daerah. Drajat Tri Kartono, seorang sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, menyatakan dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia (RRI) pada tahun 2022 bahwa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Indonesia telah menjadi permasalahan kronis yang tidak menunjukkan efek jera. Menurutnya, akar permasalahan utama terletak pada skema desentralisasi di Indonesia yang dalam pandangannya, tidak memiliki daya tahan terhadap perilaku *opportunistic behavior* dari pejabatnya (Kartono, 2022, dalam wawancara dengan RRI).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lepas dengan adanya peran dari institusi pemeriksa yang sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam organisasi (Dwiputranti, 2008). Fungsi pemeriksaan salah satunya dapat diterapkan dengan melakukan proses audit. Proses audit baik internal maupun eksternal berperan penting dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi.

Penelitian empiris mengenai peran auditor dalam mendeteksi adanya tindakan korupsi di lingkungan pemerintah telah dilakukan oleh Liu dan Lin (2012). Penelitian tersebut berfokus terhadap peran dari auditor dalam mendeteksi adanya indikasi tindakan korupsi pada lingkungan pemerintah daerah dan opini audit yang dilakukan oleh auditor. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa temuan audit dapat mendeteksi adanya tindakan korupsi di pemerintah dan upaya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi. Selain itu, hasil audit yang berupa laporan audit juga dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku korupsi di tingkat pemerintah lokal (Liu dan Lin, 2012).

Kasus korupsi pada pemerintah daerah salah satunya terjadi pada Pemerintah Kota Cimahi, di mana KPK menetapkan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi perizinan proyek Rumah Sakit Kasih Bunda. Pemeriksaan dilakukan terhadap 11 orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bandung dan Cimahi pada Jum'at, 27 November 2020. Hasilnya, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna diduga telah menerima suap sebesar Rp 1,66 miliar dari Komisaris RS Kasih Bunda, Hutama Yonathan secara bertahap dari kesepakatan sebesar Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga diberikan Hutama kepada Ajay untuk memuluskan perizinan proyek pembangunan Gedung tambahan RS Kasih Bunda. Hal tersebut dilakukan lewat pengajuan revisi IMB kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi. (Liputan 6, 2020).

Selain itu, kasus korupsi juga terjadi pada Pemkab Bandung Barat dengan tersangka Bupati Bandung Barat, Aa Umbara yang melakukan korupsi saat pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemkab Bandung Barat saat itu melakukan pengadaan paket sembako sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS). Aa kemudian meminta pengusaha PT JDG, M. Totoh Gunawan menjadi penyedia 120.000 paket Bansos dengan nilai Rp 300 ribu per paket JPS dan Rp 250 ribu per paket terkait PSBB. Aa Umbara meminta Totoh memberikan 6% dari total keuntungan yang Totoh dapatkan kepada dirinya. Selain itu, Aa Umbara juga bekerja sama dengan anaknya, Andri Wibawa. Ia diketahui sudah menyiapkan dua perusahaan penyedia paket Bansos, yakni CV Satria Jakatamilung dan CV Jayakusuma Cipta Mandiri. Kepada anaknya, Aa Umbara meminta pembagian 1% dari keuntungan yang didapatkan. Dalam membayar perusahaan anaknya, Pemkab Bandung Barat tercatat membayar dalam empat tahap dengan total Rp 36.202.500.000,00. Dari pengadaan paket Bansos itu, anaknya mendapat keuntungan Rp 2,6 miliar. (Kompas, 2022).

Dari kasus korupsi yang terjadi, jelas ada berbagai cara untuk memerangi korupsi di Indonesia, salah satunya adalah peran auditor yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan keuangan negara. Proses audit, baik internal maupun eksternal, sangat penting untuk menemukan atau mendeteksi kecurangan dan pelanggaran di pemerintahan selaku penyelenggara negara. Auditor dapat memberikan opini dan temuan audit sebagai cara untuk mengurangi kemungkinan korupsi.

Opini audit adalah pernyataan auditor tentang kredibilitas laporan keuangan entitas yang diaudit. Menurut Amani (2016), opini merupakan pertimbangan yang diberikan seorang pengaudit perihal kewajaran pembukuan perusahaan, berkaitan dengan aspek material, sesuai dengan ketentuan dalam aturan pengerjaan laporan keuangan bersumber pada pedoman akuntansi umum.

Penelitian berkaitan dengan opini audit telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrir & Suryani (2020) mengungkapkan opini audit berpengaruh signifikan di mana opini yang didapat oleh pemerintah daerah terdapat hubungan terbalik terhadap tingkat korupsi yaitu semakin banyak opini wajar yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin rendah pula tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian tersebut, peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap persepsi korupsi pemerintah daerah. Daerah yang memperoleh pernyataan tidak memberikan pendapat dari auditor memiliki persepsi korupsi yang secara signifikan lebih tinggi dibanding pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar (Masyitoh., et al., 2015).

Selain opini audit, temuan audit juga dinilai dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang disusun oleh BPK, temuan audit adalah temuan atas pengendalian intern, temuan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan temuan kecurangan dan ketidakpatuhan, yang selanjutnya dilaporkan dalam hasil pemeriksaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Nurfaidah & Novita (2022), menyatakan bahwa penyebab yang paling signifikan atas kecurangan atau korupsi yang terjadi di pemerintahan adalah lemahnya temuan audit atas lemahnya pengendalian internal.

Ferraz dan Finan (2011) menyatakan peraturan dalam pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas yang memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi. Begitu pula dengan Najahningrum (2013) yang menyebutkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan atas perundang-undangan akan mengakibatkan meningkatnya kecenderungan kecurangan.

Penelitian lainnya terkait temuan audit dan tingkat korupsi dilakukan oleh Jehandu *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa besarnya temuan audit yang dilakukan oleh BPK mempengaruhi tingkat korupsi yang terjadi. Profitabilitas temuan audit merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan temuan audit baik temuan atas pengendalian internal maupun temuan ketidakpatuhan atas perundang-undangan.

Korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah semakin meningkat dikarenakan kurangnya pengawasan dan buruknya mental para pejabat daerah. Dalam hal ini, audit eksternal diharapkan dapat mengambil peran dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan audit eksternal adalah opini audit dan temuan-temuan dalam auditnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit yang baik dapat mencerminkan akuntabilitas yang baik sehingga peluang terjadinya korupsi semakin rendah.

Walaupun begitu, ditemukan terdapat beberapa pemerintah daerah yang terjerat kasus korupsi meski hasil audit pada pemerintah daerah tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pemeriksaan audit eksternal seharusnya dapat mendeteksi terjadinya korupsi. Hal ini menjadi permasalahan karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit BPK yang dianggap tidak mampu mendeteksi adanya korupsi.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah”.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode verifikatif kuantitatif. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, yang berjumlah 27 kabupaten/kota. Semua pemerintah kabupaten dan kota ini dikalikan 3 tahun untuk menghasilkan jumlah 81 sampel, yang diambil melalui teknik sensus sampel non-probability sampling. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan. Program IBM SPSS Statistics 23 digunakan untuk memproses data.

Tabel 1. Data Kabupaten/Kota di Jawa Barat

No	Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Bandung Barat
3	Kabupaten Bekasi
4	Kabupaten Bogor
5	Kabupaten Ciamis

No	Nama Kabupaten/Kota
6	Kabupaten Cianjur
7	Kabupaten Cirebon
8	Kabupaten Garut
9	Kabupaten Indramayu
10	Kabupaten Karawang
11	Kabupaten Kuningan
12	Kabupaten Majalengka
13	Kabupaten Pangandaran
14	Kabupaten Purwakarta
15	Kabupaten Subang
16	Kabupaten Sumedang
17	Kabupaten Sukabumi
18	Kabupaten Tasikmalaya
19	Kota Bandung
20	Kota Banjar
21	Kota Bekasi
22	Kota Bogor
23	Kota Cimahi
24	Kota Cirebon
25	Kota Depok
26	Kota Sukabumi
27	Kota Tasikmalaya

Tabel 2. Perhitungan Sampel

Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat	27
Dikali : jumlah tahun	3
Total sampel penelitian	81

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Ghozali (2016) mengatakan bahwa uji kelayakan baik *Hosmer and Lemeshow Test* dapat digunakan untuk menilai kelayakan model regresi. Uji ini menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara data dan model).

Tabel 3. Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-Square	Df	Sig.
1	9,392	8	,310

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Penelitian 2024

Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi (*predicted probabilities*) dengan klasifikasi yang diamati (*observed probabilities*). Nilai Sig. 0,310 > 0,05 menunjukkan bahwa model regresi logistik biner layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Menurut Ghozali (2016) penilaian keseluruhan model (*Overall Model Fit*) dilakukan dengan membandingkan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal blok (*Block Number* = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir blok (*Block Number* = 1). Penurunan nilai Log Likelihood menunjukkan bahwa model regresi logistik biner lebih baik. Hasil pengujian metode ini dilakukan dengan IBM SPSS Statistics 23 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Iteration History Block 0

Iteration		-2 Log Likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	47,533	-1,704
	2	43,033	-2,317
	3	42,778	-2,509
	4	42,776	-2,526
	5	42,776	-2,526

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Penelitian 2024

Tabel 5. Iteration History Block 1

Iteration		-2 Log Likelihood	Coefficients		
			Constant	Opini Audit (X1)(1)	Temuan Audit (X2)
Step 1	1	40,011	,089	-1,674	-,022
	2	31,269	,566	-2,599	-,057
	3	30,086	1,136	-3,190	-,098
	4	29,953	1,434	-3,423	-,120
	5	29,951	1,475	-3,453	-,123
	6	29,951	1,476	-3,453	-,123

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Penelitian 2024

Berdasarkan tabel *Iteration history block number* = 0 adalah sebesar 42,776. Setelah dimasukkan kedua variabel independen, maka hasilnya seperti yang terdapat pada *Block Number* = 1, nilai -2 Log Likelihood (-2LL) mengalami penurunan menjadi sebesar 29,951. Penurunan -2 Log Likelihood (-2LL) ini mengindikasikan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Pengujian Secara Parsial

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a Opini Audit (X1)(1)	-3,453	1,022	11,425	1	,001	,032
Temuan Audit (X2)	-,123	,150	,669	1	,413	,884
Constant	1,476	2,176	,460	1	,498	4,375

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Penelitian 2024

Hasil uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Nilai signifikan variabel opini audit WTP yaitu X1(1) sebesar $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.
2. Nilai signifikan variabel temuan audit (X2) sebesar $0,413 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

Tabel 7. Pengujian Secara Simultan

	Chi-Square	df	Sig.
Step	12,825	2	,002
Step 1 Block	12,825	2	,002
Model	12,825	2	,002

Dari tabel tersebut diperoleh nilai sig. $0,002 < 0,05$, maka hipotesis diterima yang berarti semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini berarti pengaruh audit dan opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Step	-2 Log Likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	29,951 ^a	,146	,357

Sumber: Pengolahan Data dan Penelitian 2024

Dari hasil *Nagelkerke R Square* sebesar 0,357, menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (opini audit dan temuan audit) dalam mempengaruhi variabel dependen (tingkat korupsi pemerintah daerah) adalah sebesar 35,7% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Opini Audit (X1) Terhadap Tingkat Korupsi (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai signifikan opini audit diperoleh 0,001 pada pengujian parsial dan 0,002 pada pengujian simultan. Nilai signifikan $0,001 < 0,05$ dan $0,002 < 0,05$ menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Sementara itu nilai koefisien determinasi mendapat nilai 35,7% yang menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh Temuan Audit (X2) Terhadap Tingkat Korupsi (Y)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa temuan audit memperoleh nilai signifikan 0,413 pada pengujian parsial dan 0,002 pada pengujian simultan. Nilai signifikan $0,413 > 0,05$ menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima, yang menunjukkan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, opini audit yang baik menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah rendah.
2. Temuan Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Berapa pun jumlah temuan yang ditemukan oleh auditor BPK dinilai tidak memiliki pengaruh terhadap potensi tindak pidana korupsi secara parsial.

Acknowledge

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Pupung Purnamasari, S.E., M.Si, Ak.,CA dan Mey Maemunah, S.E, M.Ak., Ak, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan berbagai saran dan masukan kepada penulis dalam proses penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2021-2022. Transparency International. <https://www.transparency.org/cpi>
- [2] Valsecchi, M. (2012). Local Election and Corruption During Democratization : Evidence From Indonesia. University of Gothenburg.
- [3] Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2009). Propensities to engage in and punish corrupt behaviour: Experimental evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore. *Journal of Public Economics* , 93, 843-851.
- [4] Amani, F. A., (2016). "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014)". *Jurnal Nominal*, V(1), 135.
- [5] Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [6] Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Drajat Tri Kartono. (2022, Desember 25). Kaleidoskop: Daftar Kepala Daerah OTT KPK Sepanjang 2022. Radio Republik Indonesia (RRI). <https://www.rri.co.id/hukum/120620/kaleidoskop-daftar-kepala-daerah-di-ott-kpk-2022>
- [7] Dwiputranti, E. (2008). Efektivitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan Dalam Mewujudkan Reformasi Transparansi Fiskal dan Akuntabilitas Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, V(4).
- [8] Ferraz, Claudio & Finan, Frederico. (2011). Electoral Accountability and Corruption: Evidence From The Audits of Local Governments.
- [9] Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- [10] Jehandu, V., Salle, A., & Layuk, P. K. A. (2019). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 4(3), 114-131.
- [11] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023, November 2011). Publikasi. Penanganan

- Perkara. Inkracht. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/inkracht>
- [12] Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence From China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163-186.
- [13] Masyitoh, R. D., Wardhani, R., Setyaningrum, D., Pascasarjana, P., & Akuntansi, I. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Pemerintah Daerah Tingkat II. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- [14] Nanda, P. P. (2020, November 28). Wali Kota Cimahi Bantah Terima Suap Proyek Izin Rumah Sakit. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4420328/wali-kota-cimahi-bantah-terima-suap-proyek-izin-rumah-sakit>
- [15] NurFaidah, N., & Novita, N. (2022). Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 27(1), 55-65.
- [16] Setiawan, R., Magnaz Lestira, O., & Purnamasari, P. (2020). Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, dan Hasil Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Akuntansi ISSN*, 2460, 6561.
- [17] Bryan Malfin Nugraha Putra, Pupung Purnamasari, and Mey Maemunah, "Pengaruh Tingkat Debt Covenant terhadap Audit Delay dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Riset Akuntansi*, pp. 75–82, Jul. 2023, doi: 10.29313/jra.v3i1.1978.
- [18] Hamidah Dewi Anggraini, Pupung Purnamasari, and Nopi Hermawati, "Pengaruh Audit Investigatif dan Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan," *Jurnal Riset Akuntansi*, pp. 123–128, Dec. 2023, doi: 10.29313/jra.v3i2.2812.